



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

PRESS RELEASE

Awasi PDPPB 2026, Bawaslu KBB Sampaikan Imbauan kepada KPU

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan (PDPPB) Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat. Pengawasan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu untuk memastikan proses pemutakhiran data partai politik berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjamin validitas dan akuntabilitas data partai politik sebagai salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan Pemilu.

Sebagai langkah pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah menyampaikan Imbauan Nomor 35/PM.00.02/K.JB-02/06/2026 kepada KPU Kabupaten Bandung Barat terkait pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester I Tahun 2026. Imbauan tersebut disampaikan berdasarkan hasil pengawasan dan sebagai tindak lanjut dari pedoman pengawasan yang diterbitkan oleh Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menyampaikan bahwa pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan merupakan langkah preventif untuk memastikan seluruh tahapan pemutakhiran data dilaksanakan secara transparan, akurat, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas administrasi kepartaian. Oleh karena itu, Bawaslu melakukan pengawasan untuk memastikan data yang tercantum dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan memenuhi ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Dalam imbauan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat meminta KPU Kabupaten Bandung Barat untuk memastikan pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2026 berjalan sesuai mekanisme dan jadwal yang telah ditetapkan. Adapun aspek yang menjadi fokus pengawasan meliputi:

1. Ketersediaan data partai politik yang mengajukan pemutakhiran data pada Semester I Tahun 2026 (Januari–Juni 2026) dan Semester II Tahun 2026 (Juli–Desember 2026);
2. Pelaksanaan rekapitulasi dan penyampaian hasil verifikasi pemutakhiran data partai politik melalui SIPO secara berjenjang sesuai ketentuan;

3. Pengamatan dan penelaahan terhadap data serta dokumen yang diunggah dalam SIPOL, antara lain:
- Kesesuaian jumlah, nama, dan jabatan pengurus dengan Surat Keputusan (SK) kepengurusan partai politik;
 - Keabsahan dan relevansi SK kepengurusan yang diunggah;
 - Kelengkapan dokumen kantor tetap partai politik;
 - Masa berlaku SK kepengurusan yang masih aktif pada saat pemutakhiran dilakukan;
 - Keabsahan dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah memperoleh pengesahan dari kementerian terkait;
 - Kesesuaian data rekening partai politik dengan dokumen pendukung yang diunggah; serta
 - Kesesuaian data keanggotaan yang meliputi penambahan, perubahan, maupun penghapusan anggota pada masing-masing wilayah.

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menilai bahwa ketelitian dalam proses verifikasi dan pemutakhiran data partai politik sangat penting guna mencegah terjadinya ketidaksesuaian administrasi yang dapat berdampak pada kualitas data kepartaian di masa mendatang. Oleh karena itu, Bawaslu mendorong KPU Kabupaten Bandung Barat untuk melaksanakan proses verifikasi secara cermat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menegaskan bahwa pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan merupakan bagian dari mandat konstitusional lembaga pengawas Pemilu dalam menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu. Melalui pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, Bawaslu berkomitmen untuk memastikan setiap tahapan administrasi kepartaian berjalan sesuai prinsip kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Narasumber:

Siska Ayu Anggraeni

Koordinator Divisi HPS Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

Bandung Barat, 22 Juni 2026

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat